

KINERJA DINAS SOSIAL DALAM PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL TUNAI KEPADA MASYARAKAT DI DESA MARANNU KECAMATAN LAU KABUPATEN MAROS

Isnah HH^{1*}, Jaelan Usman², Rasdiana³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study aimed to explain the performance of the Social Service in equitable distribution of incidental assistance funds to the people of Marannu Village, Lau District, Maros Regency. This study used qualitative methods. Sample were 7 people that selected purposively. Research data was collected by using instruments in the form of observation, interviews and documentation. Data analysis used Miles and Huberman models. The results showed that the performance of the Social Service in equitable distribution of cash assistance to the community Marannu Village, Lau District, Maros Regency run well and it was suitable SOP if measured based on the performance assessment indicator. However, related data obtained from the Social Ministry was based on data was actually a result of recap years, and the lack of apparatus resources from the Social Service, and the crowd not referred to the health protocol.

Keywords: *performance, distribution, social assistance funds*

Abstrak

Tujuan penelitian dilakukan untuk menjelaskan kinerja Dinas Sosial dalam pemerataan penyaluran dana Bantuan Sosial Tunai kepada Masyarakat Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros. Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif. Sampel yang digunakan sebanyak 7 orang yang dipilih secara *purposive*. Data penelitian dikumpul dengan menggunakan instrumen berupa observasi, wawancara serta dokumentasi. Analisis data yang digunakan peneliti yaitu model *Miles and Huberman*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Sosial dalam pemerataan penyaluran bantuan sosial tunai kepada masyarakat Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai SOP jika diukur berdasarkan indikator penilaian kinerja. Namun, terkait data yang diperoleh dari Kementerian Sosial berpatokan pada data yang notabene merupakan hasil rekap pada tahun, dan kurangnya sumber daya aparatur yang dari Dinas Sosial, serta terjadinya kerumunan sehingga tidak terpatuhinya protokol kesehatan.

Kata kunci: kinerja, distribusi, bantuan sosial tunai

* isnahhh@gmail.com

PENDAHULUAN

Pemerintah sebagai organisasi publik memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kebijakan-kebijakan dan program-program yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 12 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa “Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak” (Indonesia, 2008).

Level dalam kinerja yaitu kinerja organisasi, kinerja proses, dan kinerja individu/ pekerjaan. Kinerja organisasi yaitu pencapaian yang diperoleh organisasi tersebut berada pada tingkat atau level yang sesuai dengan rancangan organisasi, manajemen organisasi serta tujuan organisasi (Bintang & Widowati, 2017). Selain itu kinerja organisasi- Menurut Dwiyanto (2008:50) dalam (Bintang & Widowati, 2017) kinerja organisasi publik dapat di ukur melalui beberapa indikator antara lain :1) Produktivitas; 2) Kualitas layanan; 3)

Responsivitas; 4) Responsibilitas; 5) Akuntabilitas.

Bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintah salah satunya adalah pelayanan masyarakat dalam menyalurkan kebijakan-kebijakan atau program-program pemerintah salah satunya adalah Bantuan Sosial Tunai (BST). Bantuan Sosial Tunai adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan rentan terkena dampak wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), (Statistik, 2020). Di Indonesia *Corona Virus Disease 2019* muncul sejak awal tahun 2020 yang membawa dampak negative terhadap berbagai aspek kehidupan, terutama di aspek sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Berbagai kebijakan atau program dalam rangka memberikan jaring Pengaman Sosial (JPS) terkhusus bagi masyarakat yang sedang terdampak Covid-19.

Seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Bahwa “Untuk melaksanakan jaring pengamanan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang

kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan bagi masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), perlu memberikan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai.”(Menteri Sosial, 2020).

Berkaitan dengan kinerja Pegawai di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Maros dalam menyalurkan dana Bantuan Sosial Tunai kepada masyarakat di Desa Marannu Kecamatan Lau, masih terdapat keluhan-keluhan masyarakat terkait proses penyaluran dana bantuan sosial tersebut. Dimana kinerja pegawai dinilai tidak transparan dalam pengelolaan data dari desa dan kelurahan mengenai warga yang terdampak Covid-19, masyarakat meminta pemerintah selayaknya lebih proaktif dalam bekerja dan tidak membuat masyarakat semakin marah mengenai persoalan tidak *valid* nya data sebagaimana data yang diserahkan kepada desa dan kelurahan sangat berbeda dengan data dari Dinas Sosial sehingga menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat bahwa data tersebut tidak diperbaharui apabila Dinas Sosial Ka-

bupaten Maros berpatokan pada data yang notabene merupakan hasil rekap pada tahun 2017.

Berdasarkan masalah yang terjadi di atas yang membuat penulis merasa penasaran segingga tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Kinerja Dinas Sosial dalam Pemerataan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Tunai kepada Masyarakat di Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros” Dalam hal ini, alasan yang membuat penulis tertarik dalam mengambil judul tersebut dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana kinerja yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam menyalurkan dana bantuan sosial yang dimaksud. Berhubungan dengan hal tersebut maka tujuan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui kinerja Dinas Sosial dalam pemerataan penyaluran dana Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada masyarakat Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros”.

Kinerja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2011) adalah suatu kemampuan bekerja dalam mencapai tujuan dengan cara memperlihatkan prestasi yang dimiliki. Selain itu (Sinaga, dkk, 2020) mengemukakan pengertian kinerja dapat dikatakan sebagai hasil kerja yang dapat diukur berdasarkan tanggung jawab yang dibebankan baik kepada

seseorang maupun kelompok di dalam organisasi. Sementara Keban (1995) dalam (Macella, 2020) menjelaskan kinerja merupakan arti dari “*performance*” dan kinerja merupakan hasil pencapaian suatu kegiatan, program atau kebijakan untuk mencapai visi dan misi berdasarkan sasaran dan tujuan yang telah dibuat organisasi baik itu sektor publik maupun sektor bisnis.

Kemudian menurut Lubis (2018) dalam (Hermadik, 2020) Kinerja yaitu hasil dari tahapan yang berpatokan pada standar dan ketetapan yang telah disepakati yang diukur berdasarkan jangka waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan Mangkunegara (2000:67) dalam (Huti, 2020) mengatakan bahwa kinerja adalah hasil yang telah dicapai oleh seseorang dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan baik itu hasil secara kualitas maupun kuantitas.

Berdasarkan pendapat perah ahli diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan yang diinginkan suatu organisasi dan meminimalisir kerugian. Atau kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya

sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.

Terkait dengan konsep teori kinerja diatas Rummler dan Brache dalam (Bintang & Widowati, 2017) mengemukakan bahwa terdapat tiga level dalam kinerja yaitu : 1) Kinerja organisasi, suatu tingkat pencapaian yang diperoleh organisasi tersebut berada pada tingkat atau level yang sesuai dengan rancangan organisasi, manajemen organisasi serta tujuan organisasi dapat disebut sebagai kinerja organisasi. 2) Kinerja Proses, kinerja pada proses atau tahapan dalam menghasilkan pelayanan ataupun produk. Pada level ini manajemen proses, rancangan proses serta tujuan proses, sangat berpengaruh terhadap kinerja proses. 3) Individu/Pekerjaan, Tingkat pencapaian pegawai atau pekerjaan dapat diartikan sebagai kinerja individu/pekerjaan. Dalam hal ini karakteristik pekerjaan, manajemen pekerjaan dan tujuan pekerjaan merupakan hal yang paling berpengaruh dalam kinerja ini.

Kinerja menurut (Rahajeng, 2018) kinerja organisasi dapat dikatakan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan ketika program yang telah dibuat terlaksana secara optimal dengan hasil yang memuaskan. Kemudian kinerja menurut (Junianto, 2020) yaitu dimana tingkat pencapaian sasaran maupun

tujuan instansi sebagai gambaran dari visi, misi dan strategi pemerintah yang menunjukkan tingkat kegagalan dan tingkat keberhasilan dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan kebijakan atau program yang ditetapkan.

Sedangkan (Bintang & Widowati, 2017) mengemukakan bahwa kinerja organisasi yaitu pencapaian yang diperoleh organisasi tersebut berada pada tingkat atau level yang sesuai dengan rancangan organisasi, manajemen organisasi serta tujuan organisasi. Menurut kinerja organisasi adalah tingkat kemampuan organisasi dalam mencapai visi, misi, tujuan yang telah dirancang dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan. Selain itu, Surjadi (2009) dalam (Nahrisah, 2019) berpendapat bahwa kinerja organisasi merupakan hasil dari tercapainya semua tujuan organisasi dimana dapat diketahui berdasarkan kemampuan organisasi tersebut dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah dibuat sebelumnya. Dan menurut Sobandi (2006) dalam (Julianry, dkk, 2017) kinerja organisasi merupakan pencapaian organisasi pada periode tertentu baik yang menyangkut *benefit, outcome impact, input* maupun *output*.

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli di atas maka dapat disarikan bahwa kinerja organisasi adalah tingkat kemampuan dan pencapaian organisasi dalam melaksanakan tugasnya apakah sesuai atau tidaknya dengan tujuan yang dibuat sebelumnya. Kinerja tidak lepas dari pengukuran berdasarkan standar kinerja yang dijadikan sebagai tolak ukur organisasi agar dapat mengukur sejauh mana kinerja yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu dalam mengukur kinerja suatu organisasi diperlukan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi sehingga dapat dijadikan pembandingan dalam memperbaiki kinerja organisasi.

Menurut Agus Dwiyanto (2008:50) dalam (Bintang, & Widowati 2017) kinerja organisasi publik dapat diukur melalui beberapa indikator antara lain :1) Produktivitas, dalam sebuah konsep produktivitas tidak hanya berhubungan pada efisiensi, namun terdapat efektivitas di dalam mengukurnya. Sehingga produktivitas dapat diartikan secara luas sebagai perbandingan antara input dan output. 2) Kualitas Layanan, isu menyangkut kualitas layanan cenderung menjadi sangat penting dalam menjelaskan kinerja suatu organisasi publik. Dalam hal ini pengguna jasa atau masyarakat

dalam melakukan penilaian menjadi sumber utama dari kualitas layanan itu sendiri. 3) Responsivitas merupakan tingkat kemampuan suatu organisasi dalam mengetahui kebutuhan pengguna jasa agar dapat menyusun berdasarkan prioritas pelayanan, program-program yang menjadi kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam melakukan pelayanan dapat dikembangkan oleh organisasi tersebut. 4) Responsibilitas mengarah pada kegiatan organisasi publik apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan kebijakan organisasi atau prinsip-prinsip administrasi. 5) Akuntabilitas dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merujuk pada seberapa jauh kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk kepada para pejabat yang telah dipilih oleh rakyat, sehingga dapat diketahui konsisten atau tidaknya dengan keinginan pengguna jasa atau masyarakat luas.

Sedangkan pengukuran kinerja terdiri atas enam aspek menurut Jerry Harbour dalam (Bintang, & Widowati 2017) yaitu : a) Produktivitas, b) Kualitas, c) Ketepatan waktu, d) Putaran waktu, e) Penggunaan sumber daya, f) Biaya.

Berbeda dengan pernyataan diatas terkait pengukuran kinerja organisasi, menurut John Miner sebelum dalam (Bintang, & Widowati 2017)

mengemukakan terdapat empat dimensi yang dapat digunakan organisasi untuk dijadikan tolak ukur dalam menilai suatu kinerja, diantaranya :1) Kualitas, 2) Kuantitas, 3) Penggunaan waktu dalam bekerja, 4) Kerjasama.

Ada beberapa faktor dalam menciptakan kesuksesan maupun kegagalan kinerja sebuah organisasi dalam hal ini terdapat variable-variabel yang berpengaruh penting (Suryani & John, 2018) antara lain : a) Pengelolaan Sumber Daya Manusia; b) Peran Manajer Lini; c) Keadilan dalam Organisasi; d) Efektivitas Organisasi.

Bantuan sosial menurut (Sianturi, 2017) adalah pemberian bantuan baik berupa uang maupun barang oleh pemerintah daerah kepada secara perorangan, kelompok, keluarga atau masyarakat yang sifatnya tidak secara berkelanjutan atau tidak secara terus-menerus dengan tujuan agar dapat memberikan perlindungan dari resiko sosial yang dapat kemungkinan terjadi. Sedangkan menurut Kementerian Sosial (2011:15) dalam (Winarta et al., 2020)) bahwa bantuan sosial adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin yang bersifat sementara dengan tujuan agar dapat meningkatkan kehidupan mereka sebagaimana mestinya. Sementara Kementerian Keuangan Republik Indonesia di dalam dokumen

deskripsi dan analisis APBD 2014 mendefinisikan bahwa bantuan sosial adalah jenis pemberian bantuan uang atau barang secara selektif dan bersifat tidak terus-menerus kepada masyarakat maupun organisasi profesi dengan tujuan untuk kepentingan secara umum (Purwanto, 2020).

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa bantuan sosial adalah pemberian bantuan uang atau barang kepada masyarakat yang sudah sesuai dengan ketentuan oleh pemerintah yang bersifat sementara atau tidak secara terus menerus.

Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah suatu jenis bantuan berupa pemberian uang kepada keluarga miskin dan tidak mampu serta keluarga yang terdampak wabah dimasa pandemi covid (Statistik, 2020). Besaran nilai dari bansos tunai adalah Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) per kepala keluarga dalam jangka waktu satu bulan. Sehubungan dengan hal tersebut (Menteri Sosial, 2020) menerbitkan surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Bahwa “Untuk melaksanakan jaring pengaman sosial sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan bagi masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), perlu memberikan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai”.

Berdasarkan penjelasan tersebut pemberian bansos tunai kepada membawa manfaat kepada masyarakat yaitu agar dapat memberikan perlindungan dari kemungkinan resiko sosial yang terjadi sehingga membuat masyarakat dapat mempertahankan ekstensi nya sebagai manusia yang bermartabat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini waktu yang dibutuhkan peneliti adalah dua bulan lamanya setelah dilaksanakannya seminar pra penelitian dan yang menjadi lokasi penelitian yang diambil peneliti adalah Kantor Dinas Sosial Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Jenis Penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menentukan informan me-

lalui Teknik *Purposive*, dengan jumlah informan sebanyak 7 orang. 2 orang berasal dari Dinas Sosial, 1 orang TKSK, dan 4 orang masyarakat penerima bantuan sosial tunai.

Dalam hal ini pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada saat pengumpulan data berlangsung barulah teknik analisis data dilakukan. dalam menganalisis data yang digunakan peneliti yaitu model *Miles and Huberman*. Dilakukan teknik triangulasi data menurut (Barlian, 2016) dalam menguji validitas pada penelitian ini yakni menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kinerja Dinas Sosial dalam pemerataan penyaluran dana Bantuan Sosial Tunai kepada masyarakat di Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Maros terkait kinerja Dinas Sosial dalam penyaluran dana bantuan sosial tunai kepada masyarakat di Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros yang dilihat berdasarkan produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, respon-

sibilitas, dan akuntabilitas. Maka dari itu, peneliti menyimpulkan hasil sebagai berikut:

Produktivitas

Indikator Ini bukan hanya mengukur efisien tidaknya suatu kinerja, namun juga berhubungan dengan aktivitas organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks kinerja organisasi Dinas Sosial Kabupaten Maros, produktivitas kerja yang diberikan merupakan salah satu acuan tercapai tidaknya suatu target atau rencana yang telah ditentukan.

Kinerja organisasi Dinas Sosial Kabupaten Maros jika dilihat dari produktivitasnya sudah berjalan dengan baik melihat usaha yang diberikan Dinas Sosial dalam membantu proses penyaluran agar berjalan dengan baik dan lancar. Tingkat pencapaian produktivitas di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Maros dalam menyalurkan dana BST kepada masyarakat di Desa Marannu Kec. Lau Kab. Maros seluruhnya sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan Dinas Sosial Kabupaten Maros dalam penyaluran bantuan sosial ini dilakukan semaksimal mungkin agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu dengan adanya kerjasama antara pihak dari PT Pos, Aparat sipil seperti

kepolisian dari Polres Maros, Dinas Sosial, Kecamatan, Desa, dan seluruh masyarakat penerima bantuan sosial tunai atau yang biasa disebut BST ini sehingga berjalan dengan tertib dan lancar yang mana penyalurannya dilakukan mulai sejak awal pandemi covid-19.

Kualitas Layanan

Pelayanan yang diberikan Dinas Sosial Kabupaten kepada masyarakat sangat ditentukan oleh sumber daya aparatur yang berperan dalam menangani segala kebutuhan yang diperlukan saat melakukan penyaluran dana Bantuan Sosial Tunai (BST) terlebih dimasa pandemi covid-19. Menurut para responden dalam penyaluran BST ini pelayanan yang diberikan Dinas Sosial sangat lah bagus dimana Dinas Sosial menunjukka arahan dan memberikan kepada masyarakat yang tidak tahu dimana tempat-tempat yang digunakan untuk proses pendataan, penrerimaan uang dan lainnya agar memudahkan masyarakat dalam menerima haknya. Dalam hal ini Dinas Sosial bertugas mengawasi atau memantau serta membantu dalam kegiatan penyaluran Bantuan Sosial Tunai ini kepada masyarakat baik itu di Desa Marannu Kecamatan Lau maupun diseluru desa di Kabupaten Maros.

Pelayanan yang diberikan sudah baik, namun karena kurangnya sumber daya aparatur yang dimiliki Dinas Sosial yang menyebabkan Dinas Sosial Kabupaten Maros tidak dapat mengunjungi lokasi penyaluran secara bersamaan oleh sebab itu Dinas Sosial memberikan kepercayaan kepada TKSK sebagai perwakilan dari Dinas Sosial selama proses penyaluran dana bantuan sosial tunai tersebut. Selain itu di kondisi dan situasi di tengah pandemi covid-19 sekarang selama proses kegiatan penyalura sering terjadinya kerumunan disebabkan masyarakat yang berbondong-bondong datang ke lokasi penyaluranyang menimbulkan terjadinya perkumpulan atau kerumunan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya ketegasan penyalur baik dari Dinas Sosial, Pos maupun aparat sipil.

Responsivitas

Responsivitas yang diberikan di Kantor Dinas Sosial dalam penyaluran dana BST di Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros sudah berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai harapan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa narasumber responsivitas dinas Sosial dalam proses kegiatan penyaluran dana bantuan sosial tunai kepada

masyarakat di desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros sudah sangat baik dengan melayani masyarakat baik yang datang secara langsung ke Kantor Dinas Sosial Kabupaten Maros maupun melalui TKSK untuk menyampaikan apa yang hendaknya diadakan dan yang menjadi aspirasi masyarakat sehingga dapat ditangani dengan segera.

Penyaluran bantuan sosial tunai ini tidak hanya dilakukan oleh dinas sosial saja tapi melibatkan beberapa pihak yaitu PT Pos sebagai penyalur utama yang di tugaskan langsung oleh pemerintah pusat dalam penyaluran bantuan ini, sedangkan pihak lain seperti aparat sipil, dan yang lainnya bertugas membantu selama proses penyaluran berlangsung. Meskipun demikian pada saat kegiatan penyaluran dilakukan baik oleh Dinas Sosial, Pos dan yang lainnya memberikan rasa puas kepada masyarakat dengan pelayanan dan cara petugas memperlakukan penerima dengan sangat baik sehingga para penerima merasa nyaman dan merasa tidak tertekan selama proses penyaluran berlangsung.

Responsibilitas

Pelaksanaan kegiatan organisasi publik dapat diketahui melalui reponsibilitas organisasi tersebut apakah sudah sesuai dengan kebijakan organisasi dan

prinsi-prinsip administrasi yang benar. Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Maros dilakukan sesuai dengan aturan dan SOP, terlebih lagi dimasa pandemi covid-19 sekarang ini. Responsibilitas yang diberikan dapat dinilai dari proses pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dilakkukan oleh Dinas Sosial kepada masyarakat di Desa Marannu sudah berjalan sesuai prosedur yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa narasumber terkait data penerima bantuan sosial tunai tersebut dibuat dan diberikan langsung oleh pemerintah pusat dan selama kegiatan penyaluran bantuan sosial tunai tersebut berlangsung Dinas Sosial membantu dan memantau kelancaran kegiatan tersebut dan dilakukan berdasarkan SOP yang telah ditentukan bahkan lebih dari itu. Artinya responsibilitas Dinas Sosial dalam penyaluran dana bantuan sosial tunai ini sudah cukup baik dan sesuai dengan aturan-aturan yang ada.

Akuntabilitas

Kinerja di Kantor Dinas Sosial dalam penyaludran dana Bantuan Sosial Tunai kepada masyarakat di Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros dimasa pandemi covid-19 sudah dijala-

anakan sesuai dengan perintah dan aturan yang berlaku, serta memperhatikan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat di Desa Marannu sehingga diterima dengan sangat baik, Namun dikere-nakan adanya data yang tidak valid di-mana menggunakan data yang berbasis data pada tahun 2017 sehingga dalam penyaluran

Bantuan Sosial Tunai (BST) ada yang dinilai tidak tepat sasaran. Dinas Sosial telah melakukan perbaikan data meskipun tidak semuanya diterima dan diperbaharui oleh pemerintah pusat. Penerima bantuan sosial ini barasal dari data yang diambil dari DTKS yang merupakan masyarakat yang tidak menerima bantuan lain seperti bantuan Penerima Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLS), bantu-an pangan non tunai atau pun penerima bantuan lainnya.

Data penerima bantuan sosial diberikan secara langsung dalam bentuk tunai kepada masyarakat yang tidak mampu dan masyarakat yang terdampak covid-19. Sehingga dapat dikatakan bahwa ke akuntabilisan data yang diberikan oleh pemerintah pusat itu ada-lah tidak sepenuhnya akuntantabilitas dikarenakan data yang digaunaka meru-pakan data yang berbasis data 2017, namun dengan usaha yang dilakukan oleh dinas sosial untuk memperbaiki

data yang tidak valid yang menjadikan data tersebut lebih baik dari sebelumnya dan masyarakat yang layak menerima juga memperolehh bantuan sosial tunai ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian pada bab sebe-lumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa Kinerja Dinas Sosial dalam pen-yaluran dana Bantuan Sosial Tunai kepada masyarakat Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros di-masa Pandemi Covid-19 ini,jika dilihat berdasarkan indikator penilaian kinerja diantaranya sebagai berikut: 1) Produk-tivitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Maros dalam penyaluran bantuan sosial tunai dilakukan semaksimal mungkin dan adanya Kerjasama antara PT. Pos, aparat sipil, dan lainnya sehingga da-lam pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian dengan diberikannya motivasi kepada aparat atau pegawai yang dapat meningkatkan semangat dalam melakukan kegiatan. Oleh sebab itu pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabu-paten Maros dalam pemerataan penya-luran dana bantuan sosial tunai (BST) kepada masyarakat Desa Marannu Kecamatan Lau seluruhnya sudah ter-laksana dengan baik. 2) Kualitas

Layanan yang diberikan Dinas Sosial Kabupaten kepada masyarakat sangat ditentukan oleh sumber daya aparatur yang berperan dalam menangani segala kebutuhan yang diperlukan saat melakukan penyaluran dana Bantuan Sosial Tunai (BST) terlebih dimasa pandemi covid-19. Kemudian kualitas pelayanan Dinas Sosial sudah diberikan dengan baik sesuai prosedur walupun terkadang masih ada beberapa kekurangan karena kurangnya sumber daya aparatur yang bertugas dalam penyaluran BST ini yang menyebabkan bagian dari dinas sosial tidak dapat menghadiri lokasi tempat penyaluran dilakukan di waktu yang sama secara bersamaan. 3) Responsivitas Dinas Sosial dalam penyaluran dana bantuan sosial tunai kepada masyarakat terkhusus di Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros sangat baik, dengan memberikan rasa puas kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan dan cara petugas memperlakukan penerima yang sangat baik sehingga para penerima bantuan sosial tunai merasa nyaman dan merasa tidak tertekan selama proses penyaluran berlangsung. Dengan hal demikian yang menjadikan penyaluran dana bantuan sosial tunai ini kepada masyarakat Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros sudah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang menjadi tugas

dan tujuan Dinas Sosial. 4) Responsibilitas Dinas Sosial dalam penyaluran dana bantuan sosial tunai (BST) di Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros dimasa pandemic covid-19 sudah dikatakan baik karena sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dengan memperhatikan protokol kesehatan melalui pemberian arahan dan himbauan serta memberikan pengawasan baik kepada masyarakat Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros sebagai penerima bantuan sosial tunai maupun kepada petugas penyalur bantuan sosial tunai. 5) Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial dalam penyaluran dana bantuan sosial tunai kepada masyarakat dimasa pandemi covid-19 memiliki akuntabilitas yang sudah cukup baik, serta memperhatikan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat di Desa Marannu sehingga diterima dengan sangat baik, Namun dikerenakan adanya data yang tidak valid dimana data yang digunakan berbasis data pada tahun 2017 sehingga dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) ada yang dinilai tidak tepat sasaran. Mecipun Dinas Sosial telah melakukan perbaikan data dan tidak semuanya diterima dan diperbaharui oleh pemerintah pusat.

Jadi dalam penyaluran dana bantuan sosial tunai kepada masyarakat di Desa Marannu Kecamatan Lau Kabu-

paten Maros peneliti menyimpulkan Kinerja dinas Sosial Kabupaten baru sudah baik bila ditelaah berdasarkan standar penilaian kinerja yang di kemukakan oleh Dwiyanto, 2008 yang terdiri atas produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Kinerja Dinas Sosial Kabupaten maros sudah berjalan sesuai dengan SOP dan TUPOKSI yang sudah ditentukan meskipun terdapat data yang tidak valid namun tetap terus diperbaiki.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahasa, P. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Barlian, E. (2016). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Padang: Sukabina Press.
- Bintang, A. P., & Widowati, N. (2017). Analisis kinerja organisasi pada kantor Kecamatan Blora. *Journal Public Policy and Manajement Review*, 6 (2).
- Hermadik. (2020). *Kinerja organisasi Kecamatan Satui menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah* (Skripsi, Universitas Negeri Antasari Banjarmasin).
- Huti, H. J. (2020). Analisis kinerja pegawai pada bidang umum dan pegawai pada kantor dinas kesehatan pangan dan pertanian Kabupaten Mahakam Ulu. *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (2).
- Indonesia, P. R. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah*. 1–27. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Junianto, I., Isabella, N. K. (2020). Analisis kinerja pegawai pada kantor Kelurahan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 5 (1).
- Julianry, A., Rizal., & M. J. A. (2017). Pengaruh pelatihan dan motivasi terhadap kinerja karyawan serta kinerja organisasi kementerian komunikasi dan informatika. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajement*, 3 (2).
- Macella, A. D. R. (2020). Kinerja organisasi publik dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan di kantor Kecamatan Johan Pahlawan. *Journal Public Policy*, 6 (1).
- Menteri Sosial. (2020). *Keputusan menteri sosial No.54/HUK/2020*. 1–7. Kementerian Sosial. Jakarta.
- Nahrisah, E., S. I. (2019). Dimensi organisasional citizenship behavior (OBC) dalam kinerja organisasi. *Jurnal Ilmish Kohesi*, 3 (3).
- Sinaga, O. S., dkk. (2020). Manajemen kinerja dalam organisasi. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Purwanto, I. (2020). *Analisis ketepatan pengelolaan dana bantuan sosial covid-19 sesuai peraturan menteri sosial RI no. 20 tahun 2019 (studi ada Kelurahan Pangkalan Masyhur, Medan* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan).
- Rahajeng, A. D. (2018). *Analisis pengukuran kinerja organisasi publik dengan pendekatan value for money (studi kasus di dinas pendidikan Kabupaten Sleman)* (Skripsi, Universitas Santa Dharma Yogyakarta).
- Sianturi, H. (2017). Kedudukan keuangan daerah dalam pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial berdasarkan

- prespektif keuangan negara. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 1 (1).
- Statistik, B. P. (2020). Penerima bantuan Sosial Tunai (BST). *Jurnal Badan Pusat Statistik*.
- Suryani, N. K., J. E. H. J. F. (2018). *Kinerja organisasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Winarta, I. W. T., Raka, A. A. G., & Sumada, I. M. (2020). Evaluasi kebijakan penyaluran dana bantuan sosial di pemerintah Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5 (1).